

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016-2020

Sayyid Al Habib Ahmad Nasution<sup>1</sup>, Kiagus Zainal Arifin<sup>2</sup>, Choiruddin Choiruddin<sup>3</sup>

Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: sayyid.habib08@gmail.com

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the effect of local revenue, special allocation funds, and the remaining budget financing on capital expenditures in districts/cities in South Sumatra. The research data uses secondary data. The research data comes from the APBD realization report for each district/city in South Sumatra for the 2016-2020 fiscal year. Using a sample size of up to 17 districts/cities, a total of 85 observations were made for the local budget realization report for each district/city in South Sumatra. Using multiple linear regression data analysis techniques SPSS version 26 software. Based on the results of the analysis, it is known that Regional Original Income has a positive and significant effect on Capital Expenditure partially, Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditure partially, but the Remaining Over Budget Financing has no effect and partially significant to the Capital Expenditure Allocation of Regency/City governments in South Sumatra Province. Regional Original Income, Special Allocation Funds and the Remaining Budget Financing have a positive and significant effect on Capital Expenditure simultaneously.*

**Keywords:** PAD, DAK, SiLPA, BM.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa pembiayaan anggaran terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Data penelitian menggunakan data sekunder. Data penelitian berasal dari laporan realisasi APBD tiap kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun anggaran 2016-2020. Dengan menggunakan ukuran sampel hingga 17 kabupaten/kota, total 85 pengamatan dilakukan untuk laporan realisasi anggaran daerah untuk setiap kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda software SPSS versi 26. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara parsial, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara parsial, namun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara simultan.

**Kata Kunci:** PAD, DAK, SiLPA, BM.

### PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi-fungsi dalam pemerintahan. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku bagi setiap daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah daerah

memiliki mandat yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan meminimalkan campur tangan pemerintah pusat.

Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengelola semua perbendaharaan daerah yang digunakan untuk pelayanan publik di daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menegaskan bahwa daerah berhak menentukan alokasi sumber dana untuk belanja modal dengan berpedoman pada prinsip kesesuaian, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif untuk terlebih dahulu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Kebijakan APBD Universal, atau KUA untuk jangka pendek, Batasan Anggaran Prioritas dan Sementara (PPAS) sebagai pedoman untuk alokasi sumber dana. APBD, KUA dan PPAS merupakan konkritisasi hasil penyaringan aspirasi masyarakat dalam rangka memperoleh pemahaman yang memadai tentang kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu cara yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah dan menutup kesenjangan fiskal dengan melakukan pembenahan manajemen penerimaan daerah, yang meliputi manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus. Selain dari PAD dan Dana Alokasi Khusus, Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pemerintah mendorong pembangunan secara nasional dengan memberikan dana transfer yang setiap tahun alokasi anggarannya malah semakin meningkat. Di sisi lain untuk meningkatkan penguatan pendapatan daerah, pemerintah juga telah meningkatkan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang terdapat pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Di Indonesia Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Darise (2008) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan

dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

SiLPA dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto, dalam penyusunan APBD angka SiLPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, namun dalam realisasinya SiLPA tahun terdapat surplus anggaran. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran dicatat dalam pos SiLPA. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus atau defisit APBD. Selanjutnya pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jika terjadi defisit, maka jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. Sedangkan SiLPA tahun berjalan merupakan selisih antara surplus/defisit APBD dengan pembiayaan netto (Iqbal dan Mulyani, 2016).

Faktor utama pada suatu daerah untuk mendorong kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam pertumbuhan ekonomi adanya peningkatan investasi yang dapat dilakukan diantaranya meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan memberikan proporsi belanja modal yang cakupannya lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif pada tiap daerah.

Adapun fenomena pendukung yang dapat dijadikan sebagai data pendukung didalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Jumlah PAD, DAK, SiLPA dan Belanja Modal pada 3 Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2016-2020**

Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	DAK	SiLPA	Belanja Modal
Palembang	2016	781,413,947,765.14	387,183,971,065.00	61,009,778,744.37	577,697,336,830.45
	2017	1,091,704,605,854.90	431,291,808,953.00	97,795,703,766.37	857,095,134,848.37
	2018	953,302,082,627.74	481,900,223,636.00	71,427,429,232.09	851,367,126,023.84
	2019	1,081,114,690,868.43	401,557,367,340.00	55,323,649,612.20	1,115,910,029,299.31
	2020	1,032,720,867,839.99	453,038,620,453.00	56,214,394,071.32	885,864,120,069.63
Prabumulih	2016	86,253,193,266.64	157,672,057,874.00	4,797,350,658.16	228,274,659,622.30
	2017	119,192,660,726.34	85,088,269,992.00	28,915,157,937.16	162,394,102,450.27
	2018	90,910,521,066.19	97,780,605,399.00	132,769,197,864.38	119,551,241,841.43
	2019	100,975,564,957.57	113,613,291,337.00	171,866,820,389.63	311,715,302,708.00
	2020	85,037,055,386.71	119,153,209,570.00	89,757,258,739.36	220,756,462,110.66
Lubuk Linggau	2016	75,797,426,519.36	170,264,937,127.00	2,760,570,089.94	205,417,239,958.00
	2017	115,521,939,795.78	152,397,311,824.00	1,694,371,409.21	237,003,593,139.46

2018	105,606,815,786.70	124,671,818,972.00	1,323,461,131.28	209,920,267,732.24
2019	100,950,256,993.95	140,683,552,284.00	832,396,092.82	254,283,952,721.00
2020	86,319,561,348.87	113,984,110,126.00	2,146,265,697.64	334,867,453,980.27

Sumber: *Data Diolah (2022)*

Berdasarkan tabel diatas penulis mengambil 3 daerah di Sumatera Selatan dengan melakukan perbandingan untuk diteliti yaitu kota Palembang, Prabumulih dan Lubuk Linggau. Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas, pendapatan asli daerah kota Palembang dinilai cukup stabil dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016-2020 walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan sedangkan untuk kota Prabumulih dan Lubuk Linggau dinilai tidak cukup baik dikarenakan dari tahun 2016-2020 malah mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan yang penulis nilai masih terlalu besar terhadap belanja modal pada tiap masing-masing kota bagi pengalokasian dana di Sumatera Selatan. Dari data tersebut, pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, SiLPA kemungkinan berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan dan penulis berkesimpulan alokasi belanja modal untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan keuangan daerah Sumatera Selatan masih kurang efektif.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Dana Alokasi Khusus

Menurut halim (2014: 16) “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

### Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SiLPA menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

## Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal di gunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

## METODE

### Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sugiyono (2016 : 14) menyatakan bahwa:

“Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

## Populasi dan Sampel

### Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untu dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya ditujukan untuk orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh kaerdasarkan rakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut (Sugiyono, 2016).

Populasi dalam penelitian ini adalah 4 Kota, dan 13 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2

Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama	Keterangan
1	Kabupaten Banyuasin	√
2	Kabupaten Lahat	√
3	Kabupaten Empat Lawang	√
4	Kabupaten Muara Enim	√
5	Kabupaten Musi Banyuasin	√
6	Kabupaten Musi Rawas	√
7	Kabupaten Ogan Ilir	√
8	Kabupaten Ogan Komering Ilir	√
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu	√

10	Kabupaten OKU Selatan	√
11	Kabupaten OKU Timur	√
12	Kabupaten Musi Rawas Utara	√
13	Kabupaten Pali	√
14	Kota Lubuk Linggau	√
15	Kota Pagaralam	√
16	Kota Palembang	√
17	Kota Prabumulih	√

Sumber : Data yang diolah, 2022

### Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan sampel yang diambil dari populasi diharapkan betul-betul representatif atau mewakili populasi. Kesimpulannya yang ditarik dari akan mampu diberlakukan untuk keseluruhan populasi (Sugiyono, 2016). Sehingga sampel penelitian ini adalah 4 Kota dan 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sehingga Jumlah Sampel dalam Penelitian ini yaitu 17 Sampel.

### Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumatera Selatan berupa laporan realisasi anggaran. Dari Laporan Keuangan APBD tersebut diperoleh data mengenai realisasi anggaran belanja modal, PAD, Dana Alokasi Khusus dan SiLPA Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.

### Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Untuk mempermudah analisis dan uji hipotesis yang diajukan, data yang dikumpul diolah dengan menggunakan software SPSS IBM 26. Teknik analisis ini data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis statistik deskriptif.

### HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan meneliti ini dilakukan pada 17 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup 13 Kabupaten dan 4 Kota. Pendekatan data penelitian ini menggunakan time series periode anggaran 2016-2020. Dimana jumlah data yang digunakan untuk meneliti adalah sebanyak 17 Kabupaten/Kota dikali dengan periode penelitian selama 5 tahun terakhir sebanyak 85 data.

## Deskripsi Variabel

Hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel independen dan variabel dependen dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

**Tabel 3**

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_PAD	85	23.83	27.72	25.4366	.81285
LN_DAK	85	25.02	26.90	26.0087	.46175
LN_SiLPA	85	20.54	27.24	24.2655	1.57596
LN_BELANJA_MODAL	85	25.25	27.74	26.6034	.48106
Valid N (listwise)	85				

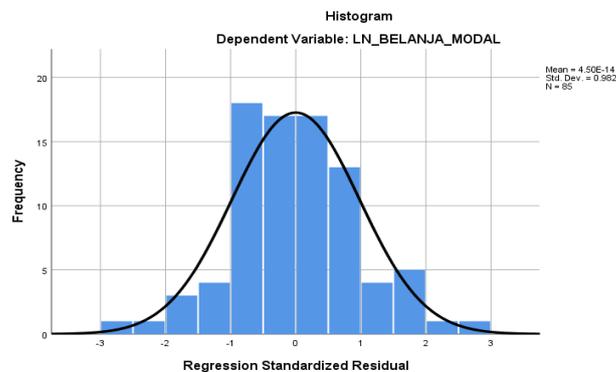
Sumber : Output SPSS IBM 26,2022

Diketahui nilai *minimum*, *maximum*, *mean* dan *standard deviation* dapat dilihat dari *output* pengujian analisis statistik deskriptif. Mengenai masing-masing data dijelaskan sebagai berikut :

1. PAD memiliki nilai terendah (*Minimum*) sebesar 23,83 pada Kabupaten Empat Lawang tahun 2016, nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 27,72 pada Kota Palembang tahun 2017, nilai rata-rata (*Mean*) sebesar 25,4366 pada Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016, dan nilai simpangan baku (*Std.Deviation*) sebesar 0,81285.
2. DAK memiliki nilai terendah (*Minimum*) sebesar 25,02 pada Kabupaten Pali tahun 2017, nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 26,90 pada Kota Palembang tahun 2018, nilai rata-rata (*Mean*) sebesar 26,0087 pada Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2017. dan nilai simpangan baku (*Std.Deviation*) sebesar 0,46175.
3. SiLPA memiliki nilai terendah (*Minimum*) sebesar 20,54 pada Kota Lubuk Linggau tahun 2019, nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 27,24 pada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020, nilai rata-rata (*Mean*) sebesar 24,2655 pada Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016, dan nilai simpangan baku (*Std.Deviation*) sebesar 1,57596.
4. Belanja Modal memiliki nilai terendah (*Minimum*) sebesar 25,25 pada Kota Pagar Alam 2018, nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 27,74 pada Kota Palembang tahun 2017, nilai rata-rata (*Mean*) sebesar 26,6034 pada Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016, dan nilai simpangan baku (*Std.Deviation*) sebesar 0,48106.

## Uji Asumsi Klasik

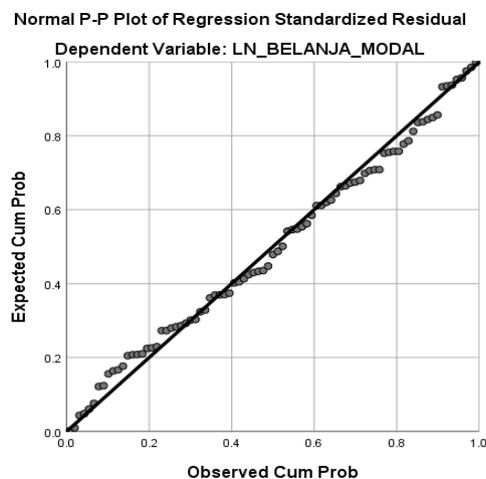
### Uji Normalitas



Sumber: Output SPSS IBM 26, 2022

**Gambar 1**  
**Analisis Histogram**

Berdasarkan Gambar 1 tersebut dapat dilihat jika posisi lonceng berada ditengah sumbu X dan membentuk lonceng sempurna yang menunjukkan data penelitian telah berdistribusi normal.



Sumber : Output SPSS IBM 26, 2022

**Gambar 2**  
**Analisis Grafik Hasil Uji Normalitas**  
**P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Berdasarkan Gambar 4.2 hasil uji normalitas menggunakan pendekatan *PP Plot of Regression Standardized Residual* dapat dilihat bahwa titik-titiknya berada tidak jauh dari garis diagonal dan mengikuti garis diagonal yang menunjukkan jika data penelitian berdistribusi normal.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Kolmogorov Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34826930
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.053
	Negative	-.059
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
a. This is a lower bound of the true significance		

Sumber : Output SPSS IBM 26, 2022

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian ini data yang digunakan berdistribusi normal. Diketahui nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar 0,200, nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian ini data yang digunakan berdistribusi normal.

## Uji Multikolonieritas

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

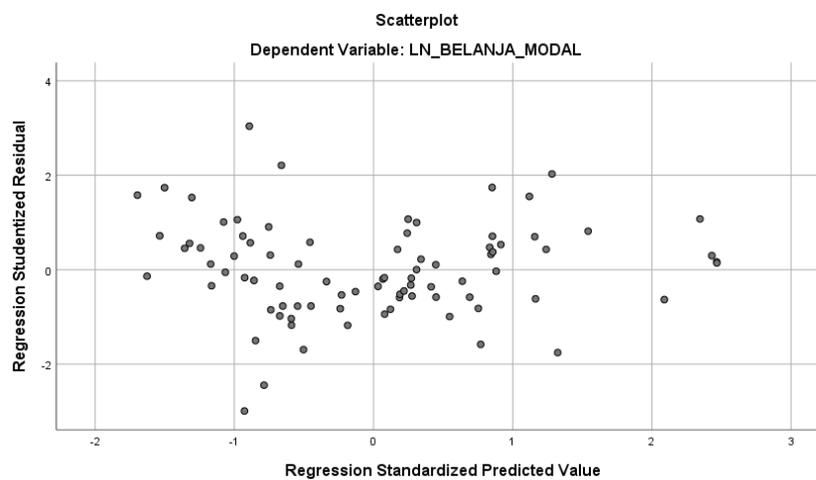
Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LN_PAD	.544	1.838
	LN_DAK	.559	1.790
	LN_SiLPA	.826	1.210

a. Dependent Variable: LN\_BELANJA\_MODAL

Sumber : Output SPSS IBM 26, 2022

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa hasil dari pengujian ini tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Nilai *tolerance* dari variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,544, variabel dana alokasi khusus sebesar 0,559, variabel SiLPA sebesar 0,826, semua variabel menunjukkan nilai *tolerance*  $\geq 0,10$ . Sedangkan nilai VIF dari variabel pendapatan asli daerah sebesar 1,838, variabel dana alokasi khusus sebesar 1,790, variabel SiLPA sebesar 1,210, semua variabel menunjukkan nilai VIF  $\leq 10$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian ini tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS IBM 26, 2022

**Gambar 3**

**Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas**

Pada gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi belanja desa berdasarkan masukan variabel independen sisa lebih perhitungan anggaran, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate	Durbin-Watson

1	.690 <sup>a</sup>	.476	.456	.35466	1.842
a. Predictors: (Constant), LN_PAD, LN_SiLPA, LN_DAK					
b. Dependent Variable: LN_BELANJA_MODAL					

Sumber : Output SPSS IBM 26, 2022

Tabel 6 di atas menunjukkan nilai DW test sebesar 1,842, nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin – Watson (DW) dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah pengamatan sampel 85 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka didapat nilai dl sebesar 1,5752, nilai du sebesar 1,7210 (lihat lampiran). Oleh karena nilai DW lebih besar dari du (1,7210) dan kurang dari 4 - du (2,279), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada autokorelasi positif dan negatif (lihat tabel keputusan).

## Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.186	2.204		5.076	.000
	LN_PAD	.229	.065	.387	3.551	.001
	LN_DAK	.348	.112	.334	3.102	.003
	LN_SiLPA	.022	.027	.073	.825	.412
a. Dependent Variable: LN_BELANJA_MODAL						

Sumber : Output SPSS IBM 26, 2022

Tabel 7 memberikan hasil nilai konstanta dan koefisien regresi, sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$= 11.186 + 0,229X_1 - 0,348X_2 + 0,22X_3 + e.$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta memiliki nilai sebesar 11.186. Nilai tersebut artinya apabila variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran, sebesar 0, maka variabel belanja modal akan bernilai 11.186.
2. Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai sebesar 0,229. Nilai tersebut artinya jika pendapatan asli daerah meningkat, maka belanja modal juga

- akan meningkat sebesar 0,229. Koefisien bernilai positif, hal tersebut berarti terjadi hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal. Semakin tinggi nilai pendapatan asli daerah, maka tingkat belanja modal juga semakin tinggi.
- Koefisien regresi variabel dana alokasi khusus memiliki nilai sebesar 0,348. Nilai tersebut artinya jika dana perimbangan meningkat, maka belanja modal juga akan meningkat sebesar 0,348. Koefisien bernilai positif, hal tersebut berarti terjadi hubungan positif antara dana alokasi khusus dengan belanja modal. Semakin tinggi nilai dana alokasi khusus, maka tingkat belanja modal juga semakin tinggi.
  - Koefisien regresi variabel sisa lebih perhitungan anggaran memiliki nilai sebesar 0,022. Nilai tersebut artinya jika sisa lebih pembiayaan anggaran meningkat, maka belanja modal juga meningkat sebesar 0,022. Koefisien bernilai positif, hal tersebut yang berarti sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 <sup>a</sup>	.476	.456	.35466
a. Predictors: (Constant), LN_SILPA, LN_DAK, LN_PAD				
b. Dependent Variable: LN_BELANJA_MODAL				

Sumber : Output SPSS IBM 26, 2022

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,456 atau sebesar 45,6%. Hal ini berarti bahwa 45,6% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen sisa lebih perhitungan anggaran, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Sedangkan sisanya sebesar 54,4% ( $100\% - 45,6\% = 54,4\%$ ) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

### Uji Hipotesis

#### Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

**Tabel 9**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	11.186	2.204		5.076	.000
	LN_PAD	.229	.065	.387	3.551	.001
	LN_DAK	.348	.112	.334	3.102	.003
	LN_SiLPA	.022	.027	.073	.825	.412
a. Dependent Variable: LN_BELANJA_MODAL						

Sumber : Output SPSS IBM 26, 2022

### Hasil Uji Statistik t

Tabel 9 di atas menunjukkan nilai t-hitung dan nilai signifikansi dari tiap variabel independen (sisa lebih perhitungan anggaran, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah) yang merupakan indikator penerimaan atau penolakan hipotesis. Dari hasil uji statistik t (uji parsial) di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai t-hitung sebesar 3,551 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ( $3,551 > 1,989$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap variabel belanja modal. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal.
2. Variabel dana perimbangan memiliki nilai t-hitung sebesar 3,102 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ( $3,102 > 1,989$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,003 < 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap variabel belanja modal. Maka dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal.
3. Variabel sisa lebih pembiayaan anggaran memiliki nilai t-hitung sebesar 0,825 dan nilai signifikansi sebesar 0,414. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ( $0,825 < 1,989$ ) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,414 > 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sisa lebih perhitungan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap variabel belanja modal. Maka dapat disimpulkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

### Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sample (Uji Statistik F)

Tabel 10

#### Hasil Uji Statistik F

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	9.251	3	3.084	24.516	.000 <sup>b</sup>
	Residual	10.188	81	.126		
	Total	19.439	84			
a. Dependent Variable: LN_BELANJA_MODAL						
b. Predictors: (Constant), LN_PAD, LN_SiLPA, LN_DAK						

Sumber : Output SPSS IBM 26, 2022

Tabel 10 di atas diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 24,516 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 24,516 lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,72 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variable sisa lebih perhitungan anggaran, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel belanja modal.

#### **Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial), nilai t-hitung untuk variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar 3,551. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel ( $3,551 > 1,989$ ), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kenyataan bahwa terdapat hubungan yang tinggi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) terhadap Anggaran Belanja Modal (Y). Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010:18) yang menyatakan bahwa peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010: 18) yang menyatakan bahwa: Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. menjadi beban yang memberatkan masyarakat. Semakin Tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maka Semakin Tinggi Pula Anggaran Belanja Modal.

#### **Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial), nilai t-hitung untuk variabel dana perimbangan adalah sebesar 3,102. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel ( $3,102 > 1,989$ ), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal.

Dana Alokasi Khusus sebagai salah satu bentuk Dana Perimbangan merupakan dana yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Hal tersebut sejalan dengan temuan Riko Novianto dan Rafiudin Hanafiah (2015) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Semakin meningkat PAD maka semakin meningkat pula alokasi belanja modal.

### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t (parsial), nilai t-hitung untuk variabel sisa lebih perhitungan anggaran adalah sebesar 0,825. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai t-tabel ( $0,825 > 1,989$ ), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel sisa lebih perhitungan anggaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel belanja modal.

Menurut Kusumawardani (2018) menyatakan bahwa Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan temuan Febriana Imas Sherli (2015) bahwa SiLPA tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Oleh sebab itu semakin meningkat SiLPA maka semakin meningkat pula alokasi belanja modal.

Hal ini berdasarkan adanya hubungan yang tidak berpengaruh positif antara variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (X3) dengan Anggaran Belanja Modal (Y). Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010 : 4) menyatakan bahwa "Apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran tersebut tidak akan lagi hangus, akan tetapi dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya yang masuk dalam kategori Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)".

Dengan tambahan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) maka Pemerintah Daerah memiliki kecukupan dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan publik dengan mengalokasikan dana yang optimal untuk anggaran belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang berasal dari peningkatan kinerja pendapatan dan efisiensi belanja daerah, merupakan dana segar yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Anggaran Belanja Modal dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Semakin tidak berpengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) maka semakin tidak berpengaruh pula anggaran belanja modal.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui F hitung sebesar 24.516. Nilai f-tabel dapat dilihat pada tabel statistik (lihat lampiran) pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 3, dan df 3 (n-k-1) atau  $85-3-1 = 81$  (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), hasil yang diperoleh untuk F-tabel sebesar 2,72. Karena F hitung > F Tabel ( $24.516 > 2.72$ ) maka  $H_0$  diterima. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0.05 maka  $H_0$  diterima, dan jika signifikansi > 0.05 maka  $H_0$  ditolak. Karena signifikansi pada uji F kurang dari 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ) maka  $H_0$  diterima. Dengan diperolehnya nilai F hitung sebesar 24.516 dengan nilai signifikansi 0.000, maka dapat disimpulkan bahwa artinya pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditunjukkan dari hasil penelitian nilai *Adjusted R Square* adalah senilai sebesar 0,456 atau 45,6%. Hal ini artinya 45,6% persentase sumbangan variabel dependen atau belanja daerah dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran, sedangkan sisanya sebesar 54,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Misalnya, komponen lain dari dana perimbangan selain dana alokasi khusus, seperti dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Hasil penelitian ini didukung oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 25 yang menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran memberikan kontribusi terhadap variabel belanja daerah. Maka dari itu, diperlukan adanya peningkatan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan belanja daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016-2020, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memiliki hubungan yang berbanding lurus.
2. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif yang signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal memiliki kontribusi dalam pengalokasian belanja modal daerah.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal artinya besar atau kecilnya SiLPA tidak mempengaruhi alokasi belanja modal karena SiLPA tidak selalu ada pada laporan APBD dan SiLPA terjadi jika hanya terjadi surplus dan digunakan untuk membiayai kewajiban lainnya yang di tahun sebelumnya belum sempat terselesaikan.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran bersamaan memiliki pengaruh secara simultan signifikan sebesar 45,6% terhadap Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dimana sisanya senilai 56,4% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti penulis.

## Saran

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan, maka saran pada penelitian ini yaitu:

1. Melihat pengaruh PAD yang sangat signifikan, pemerintah pusat diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
2. Pemerintah sebaiknya mengupayakan penggalan sumber daya alam yang baru sehingga dapat meningkatkan PAD agar dapat meningkatkan kegiatan belanja modal dan memaksimalkan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pembangunan dalam rangka pelayanan publik.
3. Sebaiknya, pemerintah daerah dapat mempertahankan Dana Alokasi Khusus tahun berikutnya untuk pengalokasian belanja modal tahun berjalan. Serta pemerintah daerah diharapkan juga untuk menggunakan dana alokasi khusus (DAK) secara efisien agar pelayanan masyarakat dapat tercipta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah variabel-variabel independen lainnya yang belum digunakan dalam penelitian ini serta dapat mempelajari lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2013, Analisis Investasi. Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat : Jakarta Halim.
- Andrian, Y., dan Samekto, A. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 10(2), 139 – 152.
- Bawono, dan Novelsya. 2012. Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD Edisi 1. Jakarta, Indonesia : Salemba Empat.
- Damodar N., Gujarati, Dawn C. Porter. 2009. Basic Econometric 5th Edition. McGraw – Hill: New York.
- Eka, P. Y., dan Nur, H. 2017. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3), 867 – 890.
- Febriana, I. S., dan S., Praptoyo. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(9), 1 – 22.

- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., Pattisahusiwa, S. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *INOVASI*, 14(1), 44 – 52.
- Frans, S., & Narundana, V. T. (2022). Strategi Pemasaran Robusta Coffee Bunga Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1109-1120.
- Ghozali, Imam dan Dwi, R. 2017. Analisis Multivariat dan Ekonometrika. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Iqbal, M., dan Mulyani, N. 2016. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Dan Belanja Operasi Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)(Studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung). *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 7(1), 1 – 8.
- Mahargono, Putri dan Imaniar. 2017. PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN SiLPA TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI JAWA TIMUR : SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan.
- Mamuka, Veronika dan I., Elim. 2014. Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA*, 2(1) 646 – 655.
- Mulia, Andirfa. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh. Aceh: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Novianto, Riko dan Rafiudin, Hanafiah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, 4(1).
- Nurzana, Merizal dan Budi R, Imam, 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Novianto, Riko dan Rafiudin, Hanafiah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, 4(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan No.145 Tahun 2013 pasal ayat 25 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer.

- Priyatno, Duwi. 2016. Belajar Alat Analisis Data Dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS Praktis dan Mudah Dipahami untuk Tingkat Pemula dan Menengah. Yogyakarta: Gava Media.
- Priyatno, Duwi. 2012. Cara Kiat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. Yogyakarta: ANDI.
- Rosadi, A. I., dan Suputra, I. D. G. D. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum Dan SiLPA Pada Alokasi Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1144 – 1173.
- Santoso, Imam, dan W., Suparta. 2015. Flypaper Effect pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 135 – 165.
- Sanusi, Anwar. 2016. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Siswantoro, Dodik. 2014. SiLPA, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Universitas Indonesia.
- Suliyanto. 2016. Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS. Yogyakarta: ANDI
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Bandung. Alfabeta.
- Wibisono, N., dan Wildaniati, A. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SiLPA dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. *JURNAL EKOMAKS*, 5(2), 11 – 20.

